

Analisis Kesenjangan Pembangunan Antara Wilayah Perkotaan dan Pedesaan: Studi Kasus Kota Serang dan Desa Cikedung, Kabupaten Serang

Yasir Arafat

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Rahadatul Aisyi Rafillah

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Diva Aditiya Tahir

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Dwi Wulan Dari

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Audry Bunga Natasya

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Ibnu Malikil Ulum

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Alamat: Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang Provinsi Banten

Korespondensi penulis: 6670220011@untirta.ac.id, 6670220078@untirta.ac.id,
6670220027@untirta.ac.id, 6670220084@untirta.ac.id, 6670220026@untirta.ac.id,
6670220093@untirta.ac.id

Abstract. *This study discusses the development gap between Serang City and Cikedung village in Serang Regency. Cikedung village is lagging behind in terms of infrastructure, education, health, and economic access, despite having great natural resource potential. The condition of damaged roads, limited public facilities, and the lack of attention of local governments are the main obstacles in village development. Meanwhile, Serang City shows rapid progress with a high Human Development Index (HDI), adequate public facilities, and economic structure that has shifted to the tertiary sector. This inequality is also seen in the Gross Regional Domestic Product (GRDP), where Serang city is dominated by the trade and service sectors, while Cikedung village still relies on a limited agricultural sector and is less driven by policy. In addition, structural barriers such as protected forest land status and bureaucratic procedures exacerbate village isolation. This study emphasizes the importance of equitable development and policies that are responsive to the periphery. Without a change in policy direction, villages like Cikedung will continue to lag behind and only become resource providers without enjoying fair and sustainable development results.*

Keywords: *development gap, Human Development Index (HDI), rural-urban inequality.*

Abstrak. Penelitian ini membahas kesenjangan pembangunan antara Kota Serang dan Desa Cikedung di Kabupaten Serang. Desa Cikedung mengalami ketertinggalan dalam aspek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan akses ekonomi, meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Kondisi jalan yang rusak, terbatasnya fasilitas publik, serta minimnya perhatian pemerintah daerah menjadi hambatan utama dalam

Received Juli 28, 2025; Revised Agustus 30, 2025; September 04, 2025

* Yasir Arafat, 6670220011@untirta.ac.id

pembangunan desa. Sementara itu, Kota Serang menunjukkan kemajuan pesat dengan indeks pembangunan manusia (IPM) yang tinggi, fasilitas umum yang memadai, serta struktur ekonomi yang telah bergeser ke sektor tersier. Ketimpangan ini juga terlihat dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), di mana Kota Serang didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa, sedangkan Desa Cikedung masih bertumpu pada sektor pertanian yang terbatas dan kurang terdorong oleh kebijakan. Selain itu, hambatan struktural seperti status lahan hutan lindung dan prosedur birokrasi memperparah keterisolasian desa. Studi ini menekankan pentingnya pemerataan pembangunan dan kebijakan yang responsif terhadap wilayah pinggiran. Tanpa perubahan arah kebijakan, desa seperti Cikedung akan terus tertinggal dan hanya menjadi penyedia sumber daya tanpa menikmati hasil pembangunan secara adil dan berkelanjutan.

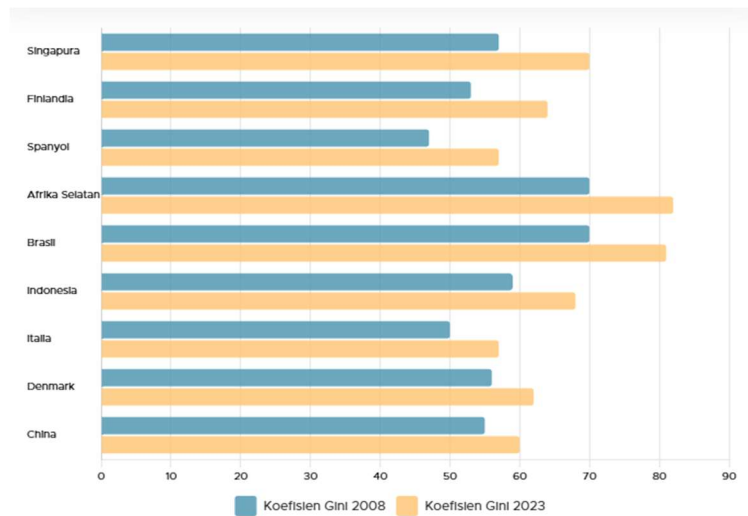
Kata kunci: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kesenjangan pembangunan, Ketimpangan wilayah desa-kota.

LATAR BELAKANG

Pemerataan pembangunan merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang dicanangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembangunan daerah perkotaan dan pedesaan yang berimbang merupakan prasyarat penting untuk tercapainya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun dalam praktiknya, pembangunan nasional cenderung terkonsentrasi di perkotaan, sehingga pedesaan mengalami ketertinggalan yang nyata baik dari segi infrastruktur, pelayanan dasar, maupun akses terhadap sumber daya pembangunan.

Fenomena ketimpangan pembangunan wilayah tidak hanya terjadi di Indonesia. Di banyak negara, kesenjangan antara pusat dan pinggiran juga menjadi masalah serius. Misalnya, di Brazil, kesenjangan pembangunan antar negara bagian sangat mencolok, karena struktur federalisme dan distribusi investasi infrastruktur yang tidak merata. Bahkan di negara maju seperti Amerika Serikat, kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan menyebabkan perbedaan yang tajam dalam kualitas hidup masyarakat. Negara-negara tersebut memiliki indeks Gini regional yang cukup tinggi, yang menunjukkan adanya ketimpangan spasial dalam tingkat pembangunan. Dilihat dari grafik di bawah ini, indeks Gini Indonesia berada di angka 68 pada tahun 2023, yang merupakan rata-rata di antara negara-negara lain yang juga menghadapi tantangan serupa.

Gambar 1. Perbandingan Indeks Gini di Berbagai Negara Tahun 2008 dan 2023



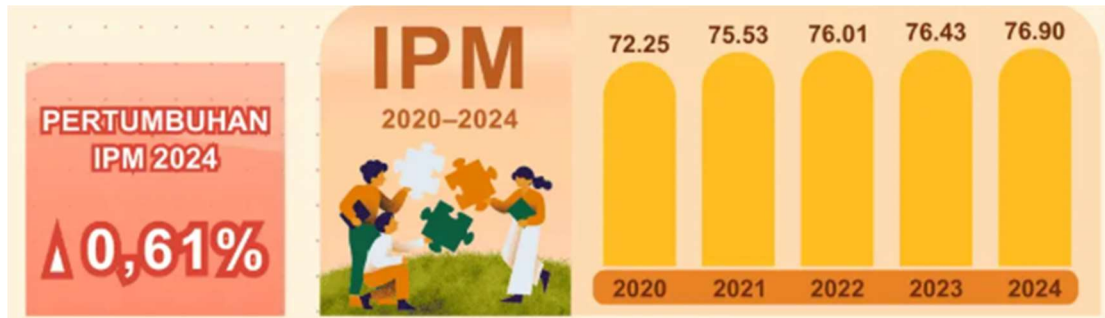
Sumber: (UBS, 2024)

Permasalahan kesenjangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan semakin menarik perhatian dalam sistem hukum nasional, terutama melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) tahun 2025-2045. Undang-undang ini merupakan respons atas kompleksitas pembangunan yang tidak merata dan menegaskan komitmen negara untuk mencapai "Indonesia Emas 2045", yang mewakili Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan.

Huruf b ayat (1) Pasal 5 Undang-Undang No. 59 tahun 2024 secara tegas menyatakan bahwa salah satu dari lima tujuan utama visi "Indonesia Emas-2045" adalah untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah menyadari pentingnya menjaga keseimbangan pembangunan antar daerah sebagai landasan stabilitas dan kemajuan nasional.

Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten memiliki peran strategis dalam pembangunan wilayah. Sebagai pusat administrasi, pendidikan, dan ekonomi, kota ini menarik arus investasi dan mobilitas penduduk. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Serang mencapai 76,90 yang menunjukkan kategori tinggi. Akses pendidikan, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur jalan relatif baik. Kota ini juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif karena dominasi industri jasa, perdagangan, dan pengolahan.

Gambar 2. Indeks Pembangunan Manusia Kota Serang Tahun 2020-2024



Sumber: (BPS Kota Serang, 2024)

Berbanding terbalik dengan kondisi tersebut, Desa Cikedung yang terletak di Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang masih masuk dalam kategori desa tertinggal. Fasilitas seperti jalan penghubung antar daerah masih belum sepenuhnya memadai dan rusak, yang secara langsung mempengaruhi lambatnya distribusi barang dan jasa. Selain itu, akses listrik, air bersih dan jaringan telekomunikasi juga tidak merata di seluruh wilayah desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa desa tertinggal seperti Cikedung masih berada pada posisi yang jauh dari cita-cita pembangunan yang berkeadilan.

Gambar 3. Infrastruktur Jalan Desa Cikedung



Sumber: (Tiktok pada akun sahabat_yandri_susanto, 2024)

Kota Serang sebagai daerah perkotaan dan Desa Cikedung sebagai daerah perdesaan terbelakang dan tertinggal merupakan gambaran nyata dampak ketimpangan

pembangunan antar wilayah. Perbedaan ketersediaan infrastruktur, pelayanan publik, dan peluang ekonomi mencerminkan bagaimana faktor spasial secara signifikan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Wilayah perkotaan seperti Serang cenderung lebih berkembang karena tersedianya sarana pendidikan, kesehatan, dan transportasi, sedangkan wilayah desa seperti Cikidang masih menghadapi tantangan yang menghalangi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Melalui pendekatan studi kasus ini, peneliti akan menggali kondisi objektif secara mendalam dan membuat perbandingan nyata, baik dari segi pembangunan fisik, ekonomi, dan sosial. Dengan demikian peneliti mengambil judul “*Potret Kesenjangan Pembangunan Wilayah Perkotaan Dan Pedesaan: Studi Kasus Kota Serang dan Desa Tertinggal Cikidang*”, dengan menganalisis perbedaan antara kedua wilayah tersebut untuk memahami hambatan struktural yang belum terpengaruh oleh kebijakan pembangunan daerah dan nasional.

KAJIAN TEORITIS

Dalam kajian Perencanaan Pembangunan, kesenjangan wilayah (*regional disparities*) merupakan isu struktural yang tidak terlepas dari konfigurasi ekonomi politik nasional. Hill (1993) menekankan bahwa ketimpangan antarwilayah di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, tidak semata-mata merupakan konsekuensi dari dinamika pasar bebas, melainkan refleksi dari keputusan-keputusan kebijakan yang cenderung terpusat dan tidak merata secara spasial.

Hill mengidentifikasi kesenjangan wilayah melalui indikator-indikator statis yang mencerminkan tingkat kesejahteraan antarwilayah, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), *Physical Quality of Life Index*, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Misalnya, data PDRB menunjukkan bahwa Jakarta memiliki pendapatan per kapita jauh di atas rata-rata nasional, yang menandakan konsentrasi aktivitas ekonomi dan akses terhadap sumber daya pembangunan di wilayah tertentu (Hill, 1993).

Lebih lanjut, Hill menyoroti adanya urban bias, yaitu kecenderungan pembangunan yang berfokus pada wilayah perkotaan dan pusat-pusat industri besar, yang berdampak pada terpinggirkannya kawasan perdesaan dan daerah-daerah luar pusat. Urban bias ini memunculkan struktur pertumbuhan yang timpang, di mana wilayah-wilayah yang

menjadi pusat pertumbuhan mendapatkan investasi, infrastruktur, dan sumber daya secara masif, sementara wilayah lainnya mengalami stagnasi atau bahkan kemunduran.

Selama masa Orde Baru, strategi pembangunan Indonesia mengadopsi konsep kutub pertumbuhan (*growth pole theory*), yang meyakini bahwa investasi besar-besaran di sektor industri dan kota-kota besar akan menghasilkan efek sebaran (*spread effect*) dan efek tetesan ke bawah (*trickle-down effect*) ke daerah sekitarnya. Namun, Hill mengkritik bahwa efek yang diharapkan tersebut tidak terjadi secara signifikan di Indonesia. Sebaliknya, pembangunan justru memperdalam ketimpangan antara pusat dan pinggiran, menciptakan distorsi dalam mobilisasi sumber daya, serta memperburuk ketidakseimbangan sosial dan ekonomi antarwilayah (Hill, 1996).

Hill menekankan bahwa kesenjangan wilayah harus dipahami dalam konteks struktur institusional dan kebijakan yang bersifat sentralistik. Negara memainkan peran utama dalam menentukan wilayah mana yang akan diprioritaskan untuk dikembangkan. Dalam hal ini, kebijakan pembangunan sering kali tidak berbasis kebutuhan lokal, melainkan diarahkan untuk mendukung kepentingan ekonomi nasional yang terkonsentrasi di wilayah tertentu. Situasi ini diperburuk oleh lemahnya mekanisme keterkaitan (*linkage*) antara sektor industri dan sektor pertanian, serta antara kota dan desa, yang idealnya dapat mendukung pertumbuhan wilayah yang lebih seimbang dan berkeadilan.

Teori kesenjangan wilayah menurut Hill (1993) menyajikan kritik tajam terhadap asumsi neoklasik tentang kemampuan pasar dalam menciptakan keseimbangan wilayah. Hill berargumen bahwa kekuatan pasar justru cenderung memperbesar ketimpangan yang sudah ada, kecuali jika diintervensi melalui kebijakan pembangunan yang berpihak pada wilayah-wilayah tertinggal. Oleh sebab itu, upaya perencanaan pembangunan wilayah perlu mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif, berorientasi spasial, dan mempertimbangkan konteks sosial-politik dalam distribusi sumber daya dan investasi pembangunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, untuk menggambarkan dan menganalisis kesenjangan pembangunan antara

wilayah perkotaan (Kota Serang) dan wilayah pedesaan tertinggal (Desa Cikedung di Kabupaten Serang). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami kondisi sosial dan ekonomi secara mendalam dan kontekstual, langsung dari lapangan, bukan melalui angka statistik semata.

Studi kasus dipilih sebagai strategi utama karena fokus penelitian adalah pada dua lokasi spesifik, yaitu Kota Serang sebagai representasi wilayah perkotaan yang maju, dan Desa Cikedung sebagai wilayah yang masih mengalami ketertinggalan. Penelitian jenis ini bersifat eksploratif dan bertujuan menggali pengalaman, persepsi, serta kondisi objektif di kedua wilayah tersebut.

Data dikumpulkan melalui empat teknik utama yaitu observasi langsung, wawancara semi-terstruktur, dokumentasi, dan studi literatur. Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi nyata infrastruktur, aktivitas masyarakat, serta fasilitas publik yang tersedia. Wawancara dilakukan terhadap informan dari masyarakat dan tokoh lokal untuk mengetahui pandangan dan pengalaman mereka mengenai pembangunan. Sementara dokumentasi mencakup foto, video, dan dokumen pendukung, dan studi literatur digunakan untuk memperkuat temuan dengan data sekunder dari buku, jurnal, berita, dan dokumen pemerintah.

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Cikedung dan Kota Serang, dengan jadwal kegiatan yang berlangsung selama periode April hingga Juni 2025, mencakup tahap perencanaan, pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan laporan akhir. Dengan metode ini, peneliti berharap dapat memberikan potret menyeluruh mengenai bentuk-bentuk kesenjangan pembangunan wilayah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Kesenjangan Wilayah Di Kota Serang Dan Desa Cikedung di Kabupaten Serang

Desa Cikedung di Kabupaten Serang merupakan cerminan dari banyak desa di Indonesia yang masih tertinggal dalam pembangunan structural (Rahayuningsih, 2021). Ketertinggalan ini tidak hanya terlihat dari akses jalan yang rusak, terjal, dan sulit dilalui, tetapi juga dari bagaimana desa ini seolah tidak dianggap strategis dalam perencanaan

pembangunan daerah. Akses menuju desa sangat terbatas, sehingga desa ini nyaris terisolasi dan hanya bisa dijangkau dengan baik oleh warga lokal yang terbiasa dengan medan berat. Hal ini berdampak langsung pada kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti layanan kesehatan yang hanya dilayani oleh satu puskesmas dengan keterbatasan ambulans atau kendaraan darurat (Yulistiyari, Umam, & Santi, 2022). Jika ada warga yang sakit, proses penanganan menjadi lambat dan berisiko tinggi. Kondisi ini sangat kontras dengan Kota Serang yang infrastrukturnya lebih maju, akses jalan yang mulus, dan fasilitas publik yang mudah dijangkau masyarakat.

Ironisnya, di tengah keterbatasan yang dialami masyarakat, Desa Cikedung justru menyimpan potensi besar baik dari segi kekayaan alam seperti air bersih, potensi wisata, maupun kekuatan sosial masyarakatnya yang kolektif. Namun, potensi ini belum dinikmati sepenuhnya oleh warga desa. Air bersih dari wilayah Cikedung, misalnya, justru lebih banyak dimanfaatkan oleh perusahaan besar seperti Krakatau Steel untuk mendukung kegiatan industri. Sementara itu, masyarakat setempat tetap kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Mereka merasa bahwa tanah dan sumber daya yang mereka miliki telah digunakan oleh pihak luar tanpa adanya timbal balik yang setara. Harapan mereka sederhana jika hasil dari tanah mereka dimanfaatkan untuk kepentingan industri, maka sudah sewajarnya mereka mendapatkan kompensasi dalam bentuk pembangunan jalan yang layak, peningkatan akses kesehatan, dan fasilitas umum lainnya.

Situasi ini menggambarkan beban ganda (*double burden*) yang harus ditanggung oleh masyarakat desa, di satu sisi mereka menjaga dan menyumbangkan sumber daya untuk kepentingan pembangunan daerah, namun di sisi lain mereka tidak pernah benar-benar merasakan manfaat dari pembangunan itu sendiri. Ketimpangan ini tidak hanya soal jarak atau akses fisik, tetapi juga mencerminkan ketidakadilan sosial dan politik, di mana desa seperti Cikedung hanya menjadi penyedia sumber daya tanpa mendapatkan perhatian yang setara. Dalam konteks yang lebih luas, kondisi ini menunjukkan bagaimana ketimpangan antara pusat dan pinggiran terus dipelihara oleh arah kebijakan pembangunan yang tidak inklusif dan cenderung berpihak pada kawasan industri serta pusat kota.

Jika dibandingkan dengan Kota Serang, kesenjangan antara wilayah desa dan kota menjadi semakin nyata (Waluya, Hidayat, & Waskitaningsih, 2024). Kota Serang sebagai

pusat pemerintahan dan perkotaan telah menikmati pembangunan yang lebih merata. Jalan-jalan kota yang mulus, akses transportasi yang lancar, fasilitas kesehatan yang tersedia luas, serta kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup menjadikan Kota Serang sebagai wilayah yang jauh lebih layak huni dibandingkan dengan desa-desa pinggiran. Sementara itu, masyarakat Desa Cikedung harus menghadapi keterbatasan setiap hari, baik dalam hal mobilitas, pelayanan publik, maupun akses ekonomi. Bahkan dalam kondisi darurat sekalipun, seperti saat sakit, warga desa harus bertaruh dengan waktu dan medan hanya untuk sampai ke layanan kesehatan terdekat. Ketimpangan ini bukan hanya menyangkut infrastruktur fisik, tetapi juga menyentuh ketimpangan sosial dan struktural yang membuat masyarakat desa seperti Cikedung terus berada dalam posisi yang tidak diuntungkan. Dalam konteks yang lebih luas, hal ini mencerminkan bagaimana pembangunan yang tidak inklusif memperlebar jurang antara pusat dan pinggiran, antara kota dan desa, antara mereka yang mendapatkan perhatian dan mereka yang hanya dimanfaatkan tanpa pernah benar-benar diperjuangkan haknya (Puasa, Tinihada, Umnoh, & Sasehang, 2025).

Kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Serang-Desa Cikedung

Indeks pembangunan manusia di Kota Serang dengan Desa Cikedung di Kabupaten Serang mengalami sebuah kesenjangan yang terjadi, indeks pembangunan manusia Kota dengan Desa sangat-sangat berbeda. IPM atau Indeks Pembangunan Manusia secara pemahaman merupakan sebuah hal alternatif yang ada untuk individu bersama pada kesempatan yang diharapkan dari masyarakat untuk mampu menjalani sebuah kehidupan yang terbaik, pada aspek pembangunan manusia menurut UNDP atau *United Nations Development Program* mengidentifikasi indikator yang utama dalam Indeks Pembangunan Manusia yaitu kesesuaian pada standarisasi hidup, indeks kesempatan pada harapan untuk hidup dan dari kualitas pendidikan. Dari pendapat UNDP mengenai indeks pembangunan manusia memberikan aspek yang penting untuk di implementasikan dan ditinjau di berbagai wilayah termasuk Kota Serang dengan Desa Cikedung, IPM yaitu sebuah aspek yang digunakan untuk mengukur sebuah tujuan dalam pencapaian dari berbagai aspek dasar yang dapat berpengaruh pada tingkat sebuah produktivitas yang diciptakan untuk dapat memberikan perbaikan pada tingkat kualitas dari taraf hidup seseorang.

Indeks pembangunan manusia dapat ditinjau secara luas serta pemberian terhadap penerima secara berkeadilan dalam mengakses layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan keadilan untuk keseluruhan lapisan masyarakat bidang ekonomi. Ketika indeks pembangunan manusia mengalami sebuah kendala maka akan menyebabkan sebuah harapan hidup manusia atau masyarakat tidak terjamin, kurangnya sebuah pendapatan wilayah, serta meningkatnya angka kemiskinan terhadap masyarakat. Menurut UNDP indeks pembangunan manusia di wilayah dapat diidentifikasi menjadi beberapa tahapan yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang dan rendah. Indikator sangat tinggi mencapai ≥ 80 , rendah hanya mencapai sebuah persentase <60 . jika tinggi berkisaran diposisi $\leq 70 - <80$, kemudian dalam aspek sedang mencapai sebuah persentase $\leq 60 - <70$ (Maulana & Farhan, 2022).

Mengenai kesenjangan indeks pembangunan manusia di Kota Serang dengan Desa Cikedung mempunyai sebuah indeks pembangunan manusia secara terpisah, dengan terjadinya hal seperti itu menyebabkan terjadi sebuah ketimpangan di wilayah perkotaan dengan pedesaan yaitu Kota Serang dan Desa Cikedung. Untuk melihat sebuah aspek indeks pembangunan manusia yang terjadi di wilayah Kota Serang dengan Desa Cikedung, yang pertama dilihat dalam bentuk kesehatan. Kesehatan Kota Serang dengan Desa Cikedung mengalami jumlah kesehatan berbeda dan menciptakan akan adanya kesenjangan, Kota Serang dalam aspek kesehatan yang ditinjau dari jumlah fisik atau tempat kesehatan, jumlah tenaga medis meliputi perawat atau bidan dan lainnya, serta sarana dan prasarana yaitu mencapai

Tabel 1. Kota Serang dalam Indeks Pembangunan Manusia dalam aspek kesehatan

Tenaga kesehatan (Perawat)	Tenaga kesehatan (Bidan)	Tenaga kesehatan - Tenaga Kefarmasian	Tenaga kesehatan- Tenaga Kesehatan masyarakat	Tenaga kesehatan- Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Jumlah Tenaga medis	Jumlah Tenaga Teknis Medis
1.320	775	120	120	32	43	443	105

Sumber : (Badan Statistik Provinsi Banten, 2024)

Jika secara fisik atau tempat Kota Serang mencapai 16 Puskesmas dengan kategori 7 Puskesmas untuk rawat inap, sedangkan 9 Puskesmas tidak rawat inap atau non inap. Jika rumah sakit umum mencapai 10, rumah sakit khusus 2, serta jumlah posyandu mencapai 790 tempat yang berada di Kota Serang. Yaitu RSUD Kota Serang, RSUD Banten, RS Benggala, RS Budi Asih, RS Ibunda Serang, RS Sari Asih Serang, RSIA Puri Garci, RS Fatimah, RSUD Dr Drajat Prawiranegara, Rs Achmad Wardi, RS Bhayangkara Tk IV Polda Banten, RS Kencana Serang. Indeks pembangunan manusia dalam aspek kesehatan Kota Serang dapat dikatakan telah mencapai sebuah indeks yang cukup baik di bidang kesehatan. (BPS, 2024)

Pada aspek di dalam indeks pembangunan manusia selanjutnya ialah pada bidang pendidikan yaitu meliputi sebuah kualitas sarana dan prasarana yang ada, kuantitas pengajar atau guru atau kebijakan yang mengatur implementasi pendidikan. Pembangunan Kota Serang dalam melakukan pembangunan di aspek pendidikan telah banyak dilakukan untuk menunjang masyarakat atau penduduk Kota Serang dalam melakukan pembelajaran atau sekolah. Jumlah sekolah yang berada di Kota Serang 935 sekolah yang meliputi (PAUD) Pendidikan Anak Usia Dini, (SD) Sekolah Dasar, (SMP) Sekolah Menengah Pertama, (SMA/SMK) Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Menengah Atas dengan banyaknya sekolah-sekolah yang berada di Kota Serang merupakan bentuk dari pemerintah Kota Serang dalam menaikkan sebuah taraf dari indeks pembangunan manusia itu sendiri dimana Kota Serang, untuk keseluruhan indeks pembangunan manusia mencapai 73, 99 % yang berarti indeks pembangunan manusia Kota Serang telah mencapai jumlah taraf tinggi.

Indeks pembangunan manusia yang telah mencapai pada taraf yang cukup baik atau tinggi, merupakan bentuk dari pemerintah Kota Serang dalam melakukan pembangunan yang maksimal di berbagai bidang yang dapat menunjang dari indeks pembangunan manusia itu sendiri, pendidikan, kesehatan, ekonomi merupakan aspek utama dalam pengukuran indeks pembangunan manusia menurut UNDP. Ketiga aspek tersebut menunjang akan sebuah kehidupan dari masyarakat atau penduduk di suatu wilayah untuk dapat memberikan sebuah kualitas kehidupan bagi mereka, kemudian indeks pembangunan manusia untuk wilayah pedesaan mengalami sebuah kesenjangan yang cukup tinggi. Dimana pedesaan atau desa indeks pembangunan manusia sangat rawan

akan terjadi kesenjangan diantara perkotaan, karena desa dalam menaikkan jumlah indeks pembangunan manusia masih mengalami berbagai kendala yang dihadapi baik secara aksesibilitas yang meliputi ekonomi, sosial, dan fisik.

Desa dalam indeks pembangunan manusia belum secara maksimal dilakukan. Salah satunya yang terjadi di desa Cikedung Kabupaten Serang, desa ini merupakan desa yang berada di Kabupaten Serang, Kec. Mancak Provinsi Banten. Keberadaan desa Cikedung mengalami kendala dalam indeks pembangunan manusia, desa ini terkendala dari berbagai kondisi di infrastruktur jalan yang menjadi faktor utama dan keadaan geografis desa. Desa Cikedung dalam aspek infrastruktur jalanan yang ada didesa tersebut tidak mendukung untuk masyarakat melakukan segala aktivitasnya, seperti untuk bersekolah, menunjang tempat kesehatan, menunjang tempat pekerjaan. Jumlah penduduk desa Cikedung mencapai 1.881 jiwa yang meliputi 995 laki-laki dan perempuan 886.

Dalam indeks pembangunan manusia terhadap aspek pendidikan desa Cikedung hanya memiliki tempat fasilitas belajar SD Cikedung atau sekolah dasar, ketika masa sekolah dasar telah selesai penduduk dari desa Cikedung untuk dapat melakukan belajar di sekolah atau fasilitas pendidikan mereka bersekolah di luar dari desa tersebut. Sarana dan prasarana dalam pembangunan fasilitas sekolah atau pendidikan belum dilakukan secara optimal oleh pemerintah setempat, padahal fasilitas pendidikan sangat penting untuk dilakukan sebuah pembangunan semaksimal mungkin karena fasilitas pendidikan ialah faktor dalam indeks pembangunan manusia yang perlu diperhatikan secara optimal oleh pemerintah dan desa.

Kemudian pembangunan pada aspek kesehatan yang berada di desa Cikedung juga belum dapat secara maksimal dibangun, dimana akses kesehatan di desa cikedung masih belum tersedia baik secara Puskesmas, Polides dan Posyandu. Namun terdapat sebuah tenaga media berjaga yaitu bidan di desa Cikedung untuk dapat yang meninjau kondisi kesehatan dari masyarakat. Kondisi tersebut dikarenakan terkendala sebuah akses yang kurang baik dari segi infrastruktur jalan, kondisi jalan yang kurang baik di desa Cikedung dalam indeks pembangunan manusia tidak mencapai sebuah taraf kesejahteraan.

Indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Serang dengan Desa Cikedung sangat mengalami adanya sebuah kesenjangan yang berarti, hal tersebut memperlihatkan bahwa dalam sebuah perbandingan indikator menurut UNDP yang menyebutkan beberapa aspek

yaitu kesehatan, pendidikan. Kedua aspek tersebut dalam pembangunannya tidak sejajar dilakukan di wilayah Kota Serang, Desa Cikedung masih mengalami sebuah persoalan-persoalan yang belum secara optimal diselesaikan yaitu terkait infrastruktur jalan.

Perbedaan PDRB Kota Serang dan Desa Cikedung

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator ekonomi yang mengukur nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah tertentu selama periode waktu tertentu, tanpa mempertimbangkan kepemilikan faktor produksi oleh penduduk (residen) atau non-penduduk (non-residen) (BPS, 2024). PDRB dapat dihitung menggunakan tiga pendekatan, yaitu produksi, pengeluaran, dan pendapatan, yang disajikan dalam harga berlaku (nominal) dan harga konstan (riil). PDRB nominal menggambarkan struktur perekonomian suatu wilayah, sedangkan PDRB riil digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dengan menghilangkan pengaruh inflasi (BPS, 2024).

PDRB memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun regional. Data PDRB digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi kebijakan ekonomi, memantau pertumbuhan ekonomi, dan menentukan strategi pembangunan yang berkelanjutan (BPS, 2024). Selain itu, PDRB per kapita berguna untuk mengukur kesejahteraan penduduk, sementara distribusi PDRB menurut lapangan usaha membantu mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang dominan dalam suatu wilayah (BPS, 2024).

Perubahan tahun dasar PDRB, seperti peralihan dari tahun dasar 2000 ke 2010, dilakukan untuk meningkatkan akurasi data dan menyesuaikan dengan *rekomendasi System of National Accounts* (SNA) 2008 dari PBB (BPS, 2024). Perubahan ini memengaruhi nominal PDRB, struktur ekonomi, serta indikator makro seperti rasio investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pembaruan tahun dasar memastikan bahwa data PDRB tetap relevan dan dapat dibandingkan secara internasional (BPS, 2024).

Kota Serang sendiri mengalami transformasi ekonomi yang signifikan selama periode 2020–2024, dengan pergeseran dominasi dari sektor primer ke sektor tersier. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Serang (2025) menunjukkan bahwa kontribusi sektor

primer (pertanian, kehutanan, perikanan, serta pertambangan dan penggalian) terhadap PDRB menurun menjadi 5,12% pada 2024, sementara sektor sekunder (industri pengolahan, listrik/gas, dan konstruksi) menyumbang 25,10%, dan sektor tersier (perdagangan, jasa keuangan, transportasi, dan jasa lainnya) mendominasi dengan 69,79%. Perubahan struktural ini sejalan dengan teori pembangunan ekonomi Kuznets (1966), yang menyatakan bahwa urbanisasi dan industrialisasi menggeser perekonomian dari berbasis pertanian ke manufaktur dan jasa.

Sektor perdagangan besar dan eceran menjadi penggerak utama perekonomian Kota Serang, dengan kontribusi 27,45% terhadap PDRB pada 2023 (BPS Kota Serang, 2025). Pertumbuhan sektor ini didorong oleh ekspansi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta meningkatnya aktivitas *e-commerce* (World Bank, 2022). Di sisi lain, sektor industri pengolahan tumbuh rata-rata 4,8% per tahun, dengan subsektor makanan dan minuman sebagai penyumbang terbesar. Namun, ketergantungan pada bahan baku impor dan fluktuasi harga energi global menjadi tantangan utama (Kementerian Perindustrian, 2023).

Pertumbuhan ekonomi Kota Serang selama periode 2020–2024 rata-rata mencapai 5,2% per tahun, dengan sektor informasi dan komunikasi serta jasa kesehatan menjadi yang paling dinamis, masing-masing tumbuh 10,6% dan 9,5% per tahun (BPS Kabupaten Serang, 2025). Pemulihan pasca-pandemi COVID-19 turut memengaruhi kinerja sektor-sektor tertentu, di mana akomodasi dan makan minum sempat berkontraksi -3,2% pada 2020 sebelum pulih di tahun-tahun berikutnya. Sementara itu, PDRB per kapita meningkat dari Rp45,96 juta (2020) menjadi Rp55,04 juta (2024), mencerminkan peningkatan kesejahteraan meski perlu diwaspadai adanya ketimpangan pendapatan (Bappenas, 2024).

Proyeksi ke depan, pertumbuhan ekonomi Kota Serang diperkirakan stabil di kisaran 5,5% pada 2025, dengan sektor jasa tetap menjadi tulang punggung. Untuk mempertahankan momentum ini, diperlukan kebijakan yang mendukung penguatan UMKM melalui digitalisasi, peningkatan akses pembiayaan, serta perbaikan infrastruktur logistik (OECD, 2023). Selain itu, diversifikasi industri pengolahan dan pengembangan ekonomi kreatif dapat mengurangi ketergantungan pada sektor perdagangan tradisional, sekaligus menciptakan lapangan kerja yang lebih berkelanjutan (Bank Indonesia, 2024).

Perekonomian Kabupaten Serang sendiri dalam periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang signifikan, dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator utama. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Serang (2025), PDRB diukur melalui dua pendekatan, yaitu harga berlaku untuk analisis struktur ekonomi dan harga konstan 2010 untuk pertumbuhan riil. Hasil analisis mengungkapkan bahwa sektor industri pengolahan dan jasa menjadi penggerak utama, sementara sektor pertanian tetap memegang peranan penting meskipun kontribusinya cenderung menurun (BPS Kabupaten Serang, 2025).

Struktur ekonomi Kabupaten Serang mengalami pergeseran, di mana sektor industri pengolahan meningkat kontribusinya dari 18% pada 2020 menjadi 20% pada 2024, sedangkan sektor pertanian turun dari 25% menjadi 22% dalam periode yang sama (BPS Kabupaten Serang, 2025). Pertumbuhan ekonomi tahunan rata-rata sebesar 5,2% didorong oleh sektor informasi dan komunikasi (10,5%), kesehatan (8,3%), dan konstruksi (7,1%), sementara sektor pertambangan tumbuh lambat (1,2%) akibat keterbatasan sumber daya (BPS Kabupaten Serang, 2025). Peningkatan PDRB per kapita dari Rp45 juta (2020) menjadi Rp52 juta (2024) mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, meskipun pertumbuhan riilnya hanya sekitar 3,5% per tahun (BPS Kabupaten Serang, 2025).

Transformasi ekonomi ini tidak terlepas dari tantangan, seperti ketergantungan pada sektor pertanian yang rentan terhadap perubahan iklim dan infrastruktur transportasi yang belum optimal. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator makroekonomi yang mencerminkan total nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah dalam periode tertentu. Meskipun data PDRB spesifik untuk tingkat desa seperti Desa Cikedung di Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, umumnya tidak tersedia secara resmi, struktur ekonominya dapat dianalisis melalui sektor-sektor dominan yang berkontribusi terhadap pembentukan nilai tambah wilayah. Desa Cikedung memiliki basis ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian, khususnya budidaya padi, yang menjadikannya salah satu sentra penghasil beras terbaik di Kabupaten Serang (Desa Cikedung, 2023). Mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani atau buruh tani, dengan sedikit variasi mata pencaharian seperti pedagang, guru, dan pekerja sektor swasta, menunjukkan rendahnya diversifikasi ekonomi (Yulistiyari et.al, 2024).

Potensi ekonomi lain yang mulai dikembangkan adalah pariwisata alam berbasis lanskap persawahan dan pegunungan. Namun, kendala infrastruktur, terutama kondisi jalan yang rusak, menghambat aksesibilitas dan distribusi hasil pertanian maupun pengembangan wisata (Antara News, 2022). Status Desa Cikedung yang masih tergolong "desa tertinggal" menurut Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2022 memperkuat gambaran tentang ketimpangan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan (RMBanten, 2022). Rendahnya tingkat pendidikan penduduk, dengan dominasi lulusan SD dan angka putus sekolah yang signifikan, juga menjadi faktor penghambat peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi (Yulistiyari et.al, 2024).

Secara implisit, PDRB Desa Cikedung didominasi oleh sektor primer (pertanian) dengan keterbatasan kontribusi dari sektor sekunder dan tersier. Untuk meningkatkan PDRB, diperlukan intervensi multidimensi, termasuk perbaikan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan diversifikasi ekonomi melalui penguatan sektor non-pertanian seperti pariwisata dan UMKM. Studi lebih lanjut dengan pendekatan penghitungan PDRB mikro dapat memberikan gambaran kuantitatif yang lebih akurat tentang kontribusi ekonomi desa ini terhadap PDRB Kabupaten Serang, yang secara keseluruhan masih didominasi oleh sektor industri pengolahan dan perdagangan (Pemerintah Kabupaten Serang, 2022).

Kualitas Hidup, Hambatan Struktural dan Analisis Kebijakan

1. Kota Serang

Kota Serang, sebagai ibu kota Provinsi Banten, menghadapi tantangan serius dalam proses perencanaan dan pembangunan wilayah. Pertumbuhan penduduk yang signifikan dalam dua dekade terakhir menjadi pendorong utama berbagai hambatan struktural yang menghambat pencapaian pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Salah satu hambatan utama yang diidentifikasi adalah ketidaksiapan struktur perencanaan wilayah dalam mengakomodasi laju urbanisasi dan migrasi yang tinggi (Nurwahyuni, Riswanda, & Ema, 2017).

Urbanisasi yang cepat tidak diimbangi oleh pengembangan infrastruktur dasar dan layanan publik yang memadai, sehingga menciptakan ketimpangan spasial dan tekanan terhadap fasilitas umum. Fenomena urban *sprawl*, yaitu ekspansi horizontal kota tanpa

kontrol tata ruang yang baik, mencerminkan lemahnya regulasi pemanfaatan lahan. Kawasan permukiman tumbuh secara organik ke arah timur tanpa hubungan yang kuat dengan pusat kota dan jaringan transportasi (Ramadhan & Chaesar, 2025). Akibatnya, wilayah pinggiran menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi publik. Ketidakseimbangan ini memperlebar jurang pembangunan antarwilayah dan menciptakan beban sosial dan ekonomi tambahan bagi masyarakat yang tinggal di area marginal.

Di sisi lain, lemahnya integrasi antara data kependudukan dengan kebijakan pembangunan menjadi penghambat mendasar. Keputusan perencanaan sering kali tidak berbasis pada sebaran dan kebutuhan riil penduduk. Hal ini menyebabkan alokasi fasilitas umum tidak merata, serta munculnya kawasan kumuh akibat permukiman yang tidak terencana. Sistem perencanaan yang tidak berbasis bukti juga menghambat respons pemerintah dalam menghadapi tekanan populasi terhadap lingkungan, seperti berkurangnya ruang terbuka hijau dan meningkatnya polusi.

Hambatan struktural lainnya adalah orientasi pembangunan yang terlalu menitikberatkan pada aspek ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan ekologis. Misalnya, alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman dan industri mengakibatkan hilangnya sumber penghidupan bagi petani, menurunnya ketahanan pangan, serta kerusakan ekosistem. Selain itu, pembangunan yang tidak sensitif terhadap dinamika demografis dan sosial menciptakan kerentanan sosial, seperti meningkatnya pengangguran, kriminalitas, dan konflik horizontal antara pendatang dan warga lokal. Hambatan struktural ini diperparah oleh terbatasnya kapasitas fiskal dan kelembagaan Pemerintah Kota Serang dalam mengelola pertumbuhan penduduk. Kebutuhan terhadap layanan dasar meningkat pesat, sementara sumber daya fiskal untuk membiayai infrastruktur tidak berkembang (Permana, Nisrina, Sitorus, Mustaqim, & Ganiadi, 2025). Ketidakseimbangan ini berisiko menggerus kualitas pelayanan publik dan memperbesar ketimpangan sosial-ekonomi antar wilayah.

2. Desa Cikedung

Persoalan mendasar yang menghambat jalannya pembangunan secara merata, terutama di wilayah pedesaan seperti Desa Cikedung, Kabupaten Serang. Permasalahan ini tercermin dari kondisi infrastruktur jalan desa yang rusak berat dan belum tersentuh

oleh pembangunan dasar seperti pengaspalan atau betonisasi. Jalan yang rusak tersebut bukan sekadar jalur lokal, melainkan merupakan akses utama masyarakat untuk menuju pasar dan kantor Kecamatan Mancak. Kondisi jalan yang tidak layak ini menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi warga, terutama dalam hal distribusi hasil pertanian. Akibat kesulitan dalam membawa hasil bumi ke pasar, harga jual pun menjadi tidak kompetitif, bahkan anjlok, sehingga berdampak negatif terhadap kesejahteraan petani lokal. Sebagaimana diketahui, mayoritas dari sekitar 1.200 warga Desa Cikedung menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian.

Kerusakan jalan yang membentang kurang lebih 15 kilometer, mulai dari Kampung Bulakan hingga Kampung Cikedung, mengindikasikan kurangnya perhatian terhadap pembangunan infrastruktur dasar di daerah-daerah pinggiran. Minimnya akses yang layak tidak hanya memperlambat mobilitas barang dan orang, tetapi juga memperbesar kesenjangan sosial-ekonomi antara desa dan pusat pemerintahan (Ramdhani, 2024). Bahkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, Abdurrahman yakni salah satu warga Desa Cikedung mengakui bahwa perjalanannya ke desa tersebut memakan waktu hingga satu jam karena harus berhati-hati melintasi jalan yang rusak.

“Warga di sini benar-bener kesulitan, apalagi anak-anak yang masih sekolah. SMP kan ada di depan, tapi kalau hujan gede, mereka sering nggak bisa berangkat karena jalanan becek parah dan licin, jadi nggak bisa dilewatin.”

Dengan demikian, hambatan tersebut mencerminkan kegagalan dalam sistem perencanaan dan implementasi pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa. Meskipun aspirasi warga akan diteruskan kepada Dinas Pertanian dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, namun hal ini juga menunjukkan bahwa sistem birokrasi kita masih reaktif, bukan preventif. Kondisi ini menegaskan pentingnya evaluasi ulang terhadap distribusi anggaran dan skala prioritas pembangunan di Kabupaten Serang agar pembangunan infrastruktur dapat menyentuh lapisan masyarakat yang selama ini terpinggirkan.

Desa Cikedung hingga kini masih tergolong sebagai desa tertinggal, salah satu penyebab utamanya adalah adanya hambatan struktural yang signifikan. Hambatan struktural ini merujuk pada kendala-kendala yang bersumber dari sistem, kebijakan, atau aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat atau institusi, yang secara tidak langsung

menghambat kemajuan dan memperparah ketimpangan sosial maupun pembangunan. Dalam konteks Desa Cikedung, hambatan tersebut berkaitan erat dengan persoalan akses infrastruktur, khususnya pembangunan jalan yang krusial bagi mobilitas warga dan distribusi ekonomi.

Jalan yang dimaksud berada di atas lahan milik Perum Perhutani dan termasuk dalam kawasan hutan lindung, sehingga secara hukum tidak bisa langsung dibangun tanpa melalui prosedur administratif yang ketat. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 83 Ayat 1 Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, setiap tindakan yang dapat mengakibatkan kerusakan hutan tanpa izin berisiko dikenai sanksi pidana maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga Rp100 miliar.

Situasi ini menyebabkan Pemerintah Kabupaten Serang harus terlebih dahulu mengajukan dan memperoleh izin resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelum dapat melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan. Proses perizinan tersebut tengah diupayakan secara intensif oleh pihak pemerintah daerah. Jika izin telah diberikan, Pemkab Serang berkomitmen untuk segera melaksanakan pembangunan jalan beton, yang ditargetkan akan dimulai pada tahun 2026.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyoroti kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan (Kota Serang) dan pedesaan (Desa Cikedung, Kabupaten Serang) sebagai bentuk nyata dari ketimpangan struktural yang berakar pada pola kebijakan pembangunan yang sentralistik dan bias perkotaan. Berdasarkan teori kesenjangan wilayah oleh Hill (1993), terungkap bahwa disparitas antarwilayah tidak hanya disebabkan oleh dinamika pasar bebas, melainkan akibat keputusan politik dan kebijakan pembangunan yang tidak merata secara spasial. Ketimpangan ini tercermin dalam perbedaan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM), PDRB per kapita, serta kualitas infrastruktur dan layanan publik. Desa Cikedung menggambarkan situasi struktural yang memarginalkan wilayah pinggiran. Kerusakan jalan utama desa yang belum pernah dibangun secara permanen menjadi hambatan serius bagi aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Meskipun desa ini memiliki potensi sumber daya alam, seperti air bersih dan lahan pertanian, namun manfaatnya belum dirasakan secara optimal oleh warga karena aksesibilitas yang buruk. Bahkan, sumber daya desa cenderung lebih banyak dimanfaatkan oleh industri besar tanpa kontribusi yang sepadan bagi masyarakat lokal. Di sisi lain, Kota Serang menunjukkan capaian pembangunan yang lebih merata, dengan infrastruktur yang memadai, pertumbuhan sektor jasa yang pesat, serta dukungan kebijakan yang terfokus. Hal ini mempertegas adanya ketimpangan antara pusat dan pinggiran. Hambatan struktural juga hadir dalam bentuk regulasi tata kelola lahan, seperti status jalan Desa Cikedung yang berada di kawasan hutan lindung, sehingga memerlukan izin khusus untuk pembangunan. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemerataan pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme pasar atau investasi sektoral, tetapi harus disertai kebijakan yang berpihak pada wilayah tertinggal, dengan pendekatan partisipatif, kontekstual, dan berbasis keadilan spasial.

DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi I; P. Rapana, ed.). Makassar: CV. syakir Media Press.
- Antara News. (2022). Mendes PDT kunjungi desa tertinggal di Kabupaten Serang. Retrieved from <https://www.antaranews.com/berita/4489429/mendes-pdt-kunjungi-desa-tertinggal-di-kabupaten-serang>
- Artha Graciela Pandiangan, Dominicus Savio Priyarsono, & Mutiara Probokawuryan. (2021). Impact of Village Funds on the Gap the Human Development Index in Rural-City Areas in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 10(2), 134–153. <https://doi.org/10.29244/jekp.10.2.2021.134-153>
- Bank Indonesia. (2024). *Laporan Perekonomian Provinsi Banten*.
- Bappenas. (2024). *Laporan Kajian Ketimpangan Pendapatan Regional*.
- BPS Kabupaten Serang. (2025). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Serang Menurut Lapangan Usaha 2020–2024*. Serang: BPS Kabupaten Serang.
- BPS, P. B. (2024). Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2024. Retrieved from Badan Pusat Statistik Provinsi Banten website: <https://banten.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdwSFJHRjRVVkJqWIRWRU9EQkhNVFY0UjB4VVVUMDkJMw==/jumlah-tenaga-kesehatan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-banten--2024.html?year=2024>
- Desa Cikedung. (2023). *Profil Desa Cikedung*. Retrieved from <https://cikedung-mancak.desa.id/profil/>

- Diah, M. P. (2020). Pembangunan Pedesaan Untuk Mengurangi Kesenjangan Antara Desa Dan Kota Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan. *Public Administration Journal of Research*, 2(2), 165–173. <https://doi.org/10.33005/paj.v2i2.45>
- Herdiana, D. (2022). Kemiskinan, Kesenjangan Sosial dan Pembangunan Desa. *Jurnal Inovasi Masyarakat*, 2(3), 172–180. <https://doi.org/10.33197/jim.vol2.iss3.2022.985>
- Kementerian Perindustrian. (2023). *No Title Profil Industri Pengolahan di Indonesia*.
- Kuznets, S. (1966). *Modern Economic Growth: Rate, Structure, and Spread*. Yale University Press.
- Maulana, B. F., & Farhan, M. (2022). *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten Tahun 2019-2021*. 1(1), 123–134.
- Milles, B, Matthew; HUberman, A. Mlchael; Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methodes Sourcebook*. In Sustainability (Switzerland) (3 Edition). SAGE Publications, Inc.
- Nurwahyuni, D., Riswanda, & Ema, I. J. (2017). PERSPEKTIF GENDER TERHADAP UNMET NEED DALAM MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP DI KOTA SERANG Dwi. *Ilmu Administrasi Negara*, 7, 64–81. Retrieved from <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/1198>
- OECD. (2023). *Economic Outlook for Southeast Asia, China, and India*.
- Pemerintah Kabupaten Serang. (2022). Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Serang tahun 2022. Retrieved from https://mancak.serangkab.go.id/storage/media/renja-rkpd-tahun-2022_1662018261.pdf
- Permana, G., Nisrina, A. D., Sitorus, A. M., Mustaqim, M., & Ganiadi, M. (2025). Hambatan dalam Implementasi Program Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Nonformal di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Serang. *Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 10(1).
- Priyarsono1, D. S., & , Miryam Bellina Lilian Sri Kurniawati Wijaya2, E. E. S. (2023). Determinan Kesenjangan Kemiskinan Desa-Kota di Indoensia. *Majalah Geografi Indonesia*, 37(2), 186–195. <https://doi.org/10.22146/mgi.70636>
- Puasa, R., Tinihada, B., Umnoh, J., & Sasehang, J. (2025). DARI PINGGIRAN KE PUSAT: Strategi Misi untuk Pemberdayaan Kaum Marginal. *Journal of Theology, Christian Religious Education and Psychospiritual*, 2(1), 42–53.
- Rahayuningsih, Y. (2021). ANALISIS USAHATANI PORANG (Amorphophalus muelleri) DI KECAMATAN MANCAK, KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 5(1), 47–55. <https://doi.org/10.37950/jkpd.v5i1.119>
- Ramadhan, F. N., & Chaesar, M. A. (2025). *Dinamika Kependudukan dan Tantangan Pengembangan Wilayah di Kota Serang*. 2.
- Ramdhani, A. R. (2024). Warga Cikedung Ngeluh ke Dewan Jalanan Rusak. Retrieved from Radar Banten website: <https://www.radarbanten.co.id/2024/01/28/warga-cikedung-ngeluh-ke-dewan-jalanan-rusak/>

- RMBanten. (2022). Tak ada lagi desa sangat tertinggal, status desa mandiri di Kabupaten Serang bertambah. Retrieved from <https://rmbanten.com/berita/tak-ada-lagi-desa-sangat-tertinggal-status-desa-mandiri-di-kabupaten-serang-bertambah>
- Sugiyono, D. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan.
- Tanjung, D., Kriswantriyono, A., Wulandari, Y. P., Suharjito, D., & Lis, Y. P. (2023). Agricultural Development In Reducing Rural-Urban Inequality Towards Strengthening The Economy Of West Java. *Jurnal Resolusi Konflik, CSR Dan Pemberdayaan*, 8(1), 62–76.
- Waluya, M. R., Hidayat, J. T., & Waskitaningsih, N. (2024). Arahana Pengembangan untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah antar Kabupaten / Kota di Provinsi Banten. *JURNAL PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN KOTA*, 1(1), 1–13.
- Wilonoyudho, S. (2009). Kesenjangan dalam Pembangunan Kewilayahan. *Forum Geografi*, 23(2), 167. <https://doi.org/10.23917/forgeo.v23i2.5009>
- World Bank. (2022). *Indonesia Economic Prospects: Digital Transformation for Growth*.
- Yudiana, K., Putri, N. N. C. A., & Antara, I. G. W. S. (2023). Kesenjangan Kemampuan Literasi Siswa Sekolah Dasar di Daerah Perkotaan, Pinggiran Kota, dan Pedesaan. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 7(3), 540–547. <https://doi.org/10.23887/jppp.v7i3.69790>
- Yulistiyari, I. E., Umam, C., & Santi, T. E. (2022). Pendampingan Kewirausahaan Skala Rumahan Berbahan Baku Daun Melinjo di Desa Cikedung Mancak Serang. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Indonesia*, 5(2), 117–122. Retrieved from <https://journal.prasetiyamulya.ac.id/journal/index.php/JPM/article/download/994/627/>
- Zuchri Abdussamad. (2021). Metode Penelitian Kualitatif